

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693023/2026**

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (135) | KEMENTERIAN HUKUM |
| 2. Unit Organisasi | : | (05) | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL |
| 3. Provinsi | : | (34) | SULAWESI BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (693023) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT |
| Sebesar | : | Rp. 2.092.936.000 | (DUA MILIAR SEMBILAN PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.092.936.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp.	2.092.936.000

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.092.936.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|----------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN MAMUJU | (178) Rp. | 2.092.936.000 |
|----------------|-----------|---------------|

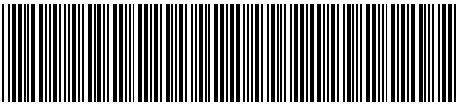
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693023/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6140-0510-3876-8046

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693023) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.092.936.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.092.936.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF Sosialisasi dan Diseminasi	150,00	orang	59.880.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01 Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	150.00	orang	59.880.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	1.689.336.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	1.375.029.000
		02	BAH.002 Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	314.307.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA Data dan Informasi Publik	2,00	dokumen, Peta, Data	343.720.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah	2.00	Data	343.720.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693023/2026
I B. SUMBER DANA



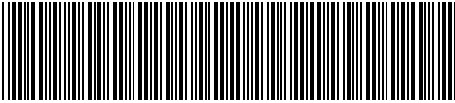
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693023) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.092.936.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693023/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6140-0510-3876-8046

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693023) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

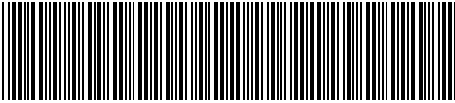
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693023	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	-	2.092.936	-	-	-	2.092.936	34 . 51	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.092.936	-	-	-	2.092.936		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.092.936	-	-	-	2.092.936		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	59.880	-	-	-	59.880		
04	PNBP	-	59.880	-	-	-	59.880		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	1.689.336	-	-	-	1.689.336		
04	PNBP	-	1.689.336	-	-	-	1.689.336		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	343.720	-	-	-	343.720		
04	PNBP	-	343.720	-	-	-	343.720	178@	
JUMLAH		-	2.092.936	-	-	-	2.092.936		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693023/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6140-0510-3876-8046

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode/Nama Satker : (693023) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

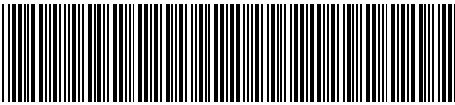
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693023	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	41.617	179.281	216.230	244.667	347.834	313.453	195.737	220.798	262.287	53.676	17.356	2.092.936
		BELANJA BARANG	0	41.617	179.281	216.230	244.667	347.834	313.453	195.737	220.798	262.287	53.676	17.356	2.092.936
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	41.617	179.281	216.230	244.667	347.834	313.453	195.737	220.798	262.287	53.676	17.356	2.092.936
	135.05.BF.7121	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	41.617	179.281	216.230	244.667	347.834	313.453	195.737	220.798	262.287	53.676	17.356	2.092.936

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693023/2026
IV A. B L O K I R



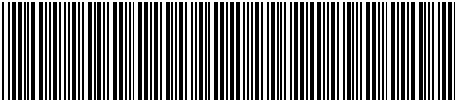
DS:6140-0510-3876-8046

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [693023] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693023	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.980
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 754.708		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 754.708	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.116
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.016	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.752
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.192
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.928	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 121.803
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 96.308		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 213.827
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)		Data dan Informasi Publik
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.400	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.620
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693023/2026
IV A. B L O K I R



DS:6140-0510-3876-8046

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [693023] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

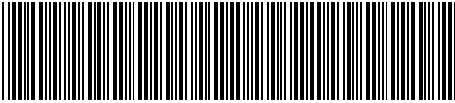
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.680 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.908 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.978 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693023/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6140-0510-3876-8046

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [693023] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001